



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEGAL  
NOMOR : 480 / 301 TAHUN 2019

TENTANG

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri ;
8. Keputusan Bupati Tegal Nomor 183 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Tim Pertimbangan Informasi Dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi, Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;

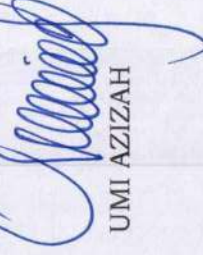
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, petugas informasi di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 25 Februari 2019

BUPATI TEGAL



UMI AZIZAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL  
 NOMOR : 480/301 /TAHUN 2019  
 TANGGAL : 25 FEBRUARI 2019

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
	000 UMUM				
1	Arsip peta foto udara	- UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf d; - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan J	Selama didalamnya masih terkandung potensi kekayaan alam	Mengungkap kekayaan alam dan rahasia Negara Indonesia	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan
2	Dokumen karya intelektual oleh lembaga/ swasta/ kelompok/ perseorangan	- UU Nomer 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta; - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf b dan j	Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/pihak yang berwenang	Berpotensi memunculkan persaingan tidak sehat; berpotensi pelanggaran hukum / pembajakan	Menjamin lingkungan kegiatan bisnis yang sehat; menjamin pemiliknya memperoleh manfaat ekonomi
3	Surat rahasia	- UU no 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j	Tidak Terbatas	Mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah / pimpinan
4	Memorandum/ surat-surat antar dan inter badan publik	- UU no 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j	Setelah nota kesepahaman direalisasikan / dilaksanakan	Menghambat kebijakan pemerintah daerah	Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
5	Disposisi surat pimpinan	- UU no 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengolah surat	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
6	Rencana pelaksanaan tukarmenukar/ pemindah tangan barang daerah	- UU no 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf e dan I	Setelah proses selesai	Berpotensi keterlibatan pihak spekulasi sehingga merugikan daerah	Menutup peluang kerugian yang ditimbulkan oleh spekulasi dan orientasi kepentingan umum dapat tercapai
100 PEMERINTAHAN					
7	Surat pengaduan masyarakat	- UU no 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf a dan j	Tidak Terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
8	Keputusan alat-alat kelengkapan DPRD yang dihasilkan melalui rapat yang bersifat tertutup	- UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pasal 370; - PP No. 16 Th 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, Pasal 69 - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j	Tidak Terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
9	Proses pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Kepala /Wakil Kepala Daerah	- UU No. 23 Th. 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU no 9 tahun 2015 tentang perubahan UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j	Setelah proses pengesahan / pengangkatan selesai	Mendahului keputusan yang diambil oleh lembaga yang memiliki kewenangan (tidak taat asas)	Sesuai dengan prosedur yang seharusnya berjalan (taat asas)
10	Proses pengangkatan perangkat desa	- UU No. 23 Th 2014 tentang Pemerintah Daerah jo UU No. 12 Tahun 2008; - PP No. 19 Th 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
11	Berkas perkara PTUN dan perkara perdata sebelum disampaikan di persidangan	- Perda No 1 Tahun 2011 tentang Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 13 huruf a; - UU No. 5 Th 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 70 ayat (2). - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf a, I, dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan, (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (3) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Memperlancar proses hukum / penyelidikan/ penyidikan, (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (3) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
12	Soal ujian tertulis pengangkatan perangkat desa	- UU No. 6 Th 2014 tentang Desa - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
13	Proses pengusulan pengesahan pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan Plt Kades	- UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2) - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
14	Identitas tersangka dan korban kasus narkoba untuk kegiatan penyelidikan	Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf a, h, dan I	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan, (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (3) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Memperlancar proses hukum / penyelidikan/ penyidikan, (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (3) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
15	Rancangan keputusan bupati pada saat proses harmonisasi di bagian hukum	- Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
16	Dokumen dan Informasi Perkara yang sedang ditangani oleh PPNLSH	- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf a dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Memperlancar proses hukum / penyelidikan/ penyidikan dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
17	Dokumen proses penyelesaian sengketa/ konflik lingkungan	- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf a dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Memperlancar proses hukum / penyelidikan/ penyidikan dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
18	Informasi data pribadi penegak perda	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
19	Berita Acara pemeriksaan	- UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf a dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Memperlancar proses hukum / penyelidikan/ penyidikan dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
	200 POLITIK				
20	Arsip daftar orang yang masuk G30 S/PKI dan organisasi terlarang lainnya	- UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3) - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf h dan j	Tidak terbatas	(1) Mengungkap rahasia pribadi dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Melindungi data pribadi dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
21	Proses Keputusan Mendagri tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota/Pimpinan DPRD	Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I	Tidak terbatas	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat
22	Proses Penetapan Keputusan Gubernur Jateng Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota/Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota	Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I	Tidak terbatas	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat



NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	MANFAAT APABILA DI TUTUP
23	Penunjukkan petugas pembuatan naskah ujian dan dokumen naskah ujian Perangkat desa	- PP No. 19 Th 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan yang dapat merugikan UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
24	Data kegiatan intelijen terkait dengan ideologi, politik, sosial budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang mengganggu masyarakat	- UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf c, i, dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara dan/ atau daerah, (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (3) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga pertahanan dan keamanan negara dan/ atau daerah/ wilayah dan (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (3) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
25	Peta Lokasi Penyimpanan Arsip	- UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3) - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan yang dapat merugikan UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
26	Identitas korban yang dirujuk di Pusat Pelayanan Terpadu BP3AKD Provinsi Jateng	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
27	Informasi perkara pelanggaran perda yang sedang ditangani PPNS	- Kep Menhukham No. 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Permendagri No. 4 Tahun 2007 tentang PPNS di Lingkungan Pemda - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf a, I, dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan, (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (3) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Memperlancar proses hukum / penyelidikan/ penyidikan, (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (3) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
28	Informasi hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran perda	- UU No. 23 Tahun 2014 ; - PP No. 6 Tahun 2010; - UU No. 14 Th 2008, Pasal 17 huruf a, I, dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan, (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (3) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Memperlancar proses hukum / penyelidikan/ penyidikan, (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (3) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
	400 KESEJAHTERAAN RAKYAT				
29	Usulan calon penerima bantuan sosial	Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf e	Tidak terbatas	Dapat merugikan ketahanan Ekonomi	Melindungi ketahanan Ekonomi
30	Rencana alokasi bersubsidi	Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf e	Tidak terbatas	Dapat merugikan ketahanan Ekonomi	Melindungi ketahanan Ekonomi
31	Naskah soal UN/UNPK/UASEN, dll	- UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf i dan j; - Permendiknas, Petunjuk Operasional Sistem	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
32	Proses scanning UN/UNPK/UASBN	- UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf i dan j; - Permendiknas, Petunjuk Operasional Sistem	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
33	Proses Rekrutmen Siswa Pusat Pendidikan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP), Petukaran Pemuda Antar Negara (PPAN), Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (SP3) dan Pemilihan Paskibra	- UU No. 3 Th. 2005 Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4); - UU no. 40 Th. 2009 Pasal 27 ayat (3) - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
34	Dokumen rekam medis termasuk nomor registrasi rekam medis	- UU No. 35 Th 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat (1); - UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 47 ayat (2) - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf h dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
35	Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien	- UU No. 35 Th 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat (1) - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf h dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
36	Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	- Permenkes No. 1419/MENKES/PER/X/2005 Pasal 18 ayat (1); - UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 48 dan Pasal 51 huruf c - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf h dan j	Tidak Terbatas	(1) Dapat mengungkap Rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat mengungkap Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan atau tidak boleh diungkap	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
37	Hasil audit medik pada sarana kesehatan	- Kepmenkes No. 496/Menkes/SK/IV/2005 - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf h dan j	Tidak Terbatas	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	Menjaga akuntabilitas sarana kesehatan
38	Proses penentuan penerima bantuan kepada pemerintah desa/kelurahan dan kelompok masyarakat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat
39	Hasil Diagnosa / Bedah Kasus Calon Kelayan (Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i	Tidak Terbatas	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang dan (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat
40	Data Kelayan UPT (penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i	Atas ijin yang bersangkutan	Bertentangan dengan privasi seseorang	Menjaga privasi seseorang

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
41	Data pribadi penduduk	- Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Bab VII Bagian Kedua Pasal 58 dan 59 - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf h dan j	Atas ijin yang bersangkutan dan kepentingan public berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan public	Bertentangan dengan hak pribadi / privasi yang berpotensi disalahgunakan	Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing individu / pribadi
42	Daftar rekam medik PNS	UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf h dan huruf j	Atas ijin yang bersangkutan dan selama menjadi PNS	Bertentangan dengan privasi seseorang	Menjaga privasi seseorang
43	Data kelayakan UPT(penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)	UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf h, I dan j	Atas ijin yang bersangkutan dan ijin dari pemangku kepentingan kebijakan	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang dan (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat
44	Data Penderita HIV/AIDS	UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf h dan huruf j	Atas ijin yang bersangkutan	Potensi menimbulkan kerawanan / kekhawatiran masyarakat	Sebagai analisis kebijakan daerah
	500 PEREKONOMIAN				
45	Surat Perijinan/Ijin Usaha beserta dokumennya	- UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b dan j	Sampai dikeluarkannya ijin usaha; selama izin masih dipergunakan	Mengungkapkan data pribadi pemegang izin	Menjaga privasi dari pemegang izin
46	Data kekayaan alam	- UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf d dan j	Sampai diusahakan oleh pemerintah daerah	Dapat mengungkapkan kekayaan alam yang berpotensi disalahgunakan	Mempermudah pengelolaan dan pengaturan sumber daya alam

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
47	Kajian pemerintah Pusat dan Berita Acara Pelepasan Tanah Kas Desa	- UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf e dan j	Setelah kebijakan diputuskan oleh pemerintah	Berpotensi munculnya spekulasi yang bermaksud mengambil keuntungan	Lebih mengedepankan optimalisasi untuk kepentingan pembangunan
48	Kajian pemerintahan pusat dan berita acara pelepasan tanah aset pemerintah daerah	- UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I dan j	Sampai proses selesai	Berpotensi munculnya spekulasi yang bermaksud mengambil keuntungan	Lebih mengedepankan optimalisasi untuk kepentingan pembangunan
49	Berita sandi	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
50	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
51	Perangkat khusus persandian	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
52	Kunci sistem sandi	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
53	Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
54	Jalur komunikasi VVIP	UU No. 14 Th 2008 Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
55	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
56	Berita/Radiogram rahasia	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
57	Dokumen izin usaha pertambangan (IUP)	- UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b, d, dan j	Selama proses ijin sudah dikeluarkan	Membuka privasi seseorang	Menjaga privasi seseorang
58	Hasil eksplorasi detail (Koordinat Potensi Bahan Tambang, Kualitas dan Kuantitas Komoditas Tambang)	- UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b, d, e, dan j	Bila potensi sudah diusahakan / dikelola	Berpotensi spekulasi yang ingin mengelola demi kepentingan pribadi / korporasi	Membuka investasi yang bertanggung jawab
59	Laporan studi kelayakan/PS (Nilai Ekonomis Komoditas Tambang, Perkiraan, Jumlah Cadangan, Kualitas Bahan Tambang, Sebaran)	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat (3) huruf b dan 17 huruf b dan d	Sampai dengan terpelihnya	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan kegiatan usahanya	Melindungi pelaku usaha pertambangan dari persaingan yang tidak sehat

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
60	Laporan Evaluasi Kegiatan Penambangan	- UU No. 4 Th. 2009 tentang Mineral dan Batubara Pasal 89 - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf b, d, e, dan j	Setelah laporan evaluasi dikeluarkan oleh yang berwenang melakukan evaluasi	Mengganggu obyektifitas evaluasi yang akan dilakukan	Menjaga obyektifitas evaluasi yang akan dilakukan
61	Data Teknis Potensi Air Tanah	- PP No. 43 Th. 2008 tentang Air Tanah Pasal 23 ayat (3) - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf d dan j	Selama potensi air tanah diperkirakan masih ada	Dapat mengungkapkan kekayaan alam	Memper memudahkan pengaturan dan pengelolaan SDA
62	Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) / Koordinat	- UU No. 4 Th. 2009 Pasal 88 - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf b, d, dan j	Setelah penilaian oleh yang berwenang dapat diselesaikan	Potensi timbulnya manipulasi data oleh pihak pemakai	Mengamankan dari potensi adanya manipulasi
63	Data Teknis hasil kegiatan survey pendahuluan, eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi potensi Panas Bumi	- UU No. 27 Th. 2003 tentang Panas Bumi Pasal 4 ayat (3) - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf d dan j	Selama dilakukan eksplorasi oleh pemerintah	Berpotensi terbukanya investasi yang tidak mengedepankan kepentingan masyarakat	Mendorong eksplorasi dilakukan oleh pemerintah demi kepentingan masyarakat luas
64	Surat pengajuan Hak Merk, Cipta, Paten, dan Desain yang masih dalam proses KEMENHUKHAM	Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf b	Sampai selesainya proses pengajuan	Potensi untuk ditiru secara melawan hukum	Menjaga dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain
65	Data Debitur dana bergulir	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 3	Atas permintaan penyidikan	Informasi dapat disalahgunakan dan berpotensi merugikan orang lain	Menghindari informasi yang keliru yang bisa merugikan orang lain



NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
66	Surat Keterangan Asal (SKA) barang, penerbitan Surat Pemberitahuan Ekspor Kopi (SPEK), perbitan Angka Pengenal Impor (API) dan dokumen lainnya dibidang perdagangan luar negeri	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b	Setelah dokumen tidak diperlukan lagi karena berhentinya usaha yang telah dilakukan	Potensi munculnya manipulasi yang dilakukan oleh pelaku usaha	Menjaga dari potensi manipulasi yang dilakukan oleh pengusaha
67	Data jaringan bisnis perusahaan/Badan Usaha	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b	Apabila sudah tidak memiliki manfaat ekonomis	Berpotensi munculnya persaingan tidak sehat	Menjamin iklim persaingan usaha yang sehat
68	Hasil Uji Laboratorium untuk Keperluan Ekspor	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b dan I	Selama proses sedang berlangsung		
69	Lokasi Server	- UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf b, I dan j	Selama masih digunakan	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
70	Internet Protocol/ IP Address Private	- UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf b, I dan j	Selama masih digunakan/berlaku	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
71	Bandwidth Management	- UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf b, I dan j	Selama masih digunakan/berlaku	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	MANFAAT APABILA DI TUTUP
				APABILA DIBUKA	
72	Sistem Keamanan Informasi	- UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf b, I dan j	Selama masih difungsikan / digunakan	Menimbulkan potensi kerugian investasi untuk kepentingan umum / merugikan keuangan Negara	Terjaga dari potensi kerugian
73	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- Perpres RI No 54 Th 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan j	Sampai proses selesai / diketahui pemenangnya	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang / jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan
74	Rincian Harga Perkiraan sendiri (HPS)	- Perpres RI No 54 Th 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b, I, dan j	Sampai diketahui pemenangnya	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang / jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang / jasa
75	Dokumen penawaran kontrak	- Perpres RI No 54 Th 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b, I, dan j	Sampai proses penawaran kontrak selesai	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektifitas penilaian/evaluasi penawaran
76	Susunan kepanitiaan pengadaan barang/jasa melalui LPSE	- Perpres RI No 54 Th 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j	Selama proses pengadaan barang / jasa	Dapat terjadi harga lelang tidak sesuai yang diharapkan	Menghindari konflik kepentingan, menjaga persaingan lelang yang sehat, melindungi kerahasiaan dokumen

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
77	Hasil Uji Laboratorium tentang keamanan pangan produk segar	Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf b dan l	Sampai diketahuinya hasil uji lab	Bisa berpotensi dipalsukan	Mencegah pemalsuan oleh orang yang tidak bertanggungjawab
78	Hasil Uji Laboratorium pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf e dan l	Sampai diketahuinya hasil uji lab	Bisa berpotensi dipalsukan dan disalahgunakan	Mencegah pemalsuan oleh orang yang tidak bertanggungjawab
79	Proses penetapan penerimaan bantuan sosial kemasyarakatan	Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf l	Sampai penetapan penerima bantuan	Berpotensi menimbulkan kerawanan dan persaingan di dalam masyarakat	Memuluskan perencanaan program yang dibuat oleh pemerintah
	600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN				
80	Biodata individu dan data keluarga :  a. Ketenagakerjaan b. Transmigrasi	Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf h	Atas ijin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum	Bertentangan dengan privasi seseorang	Menjaga privasi seseorang
81	Nama dan alamat tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja pada perusahaan di Indonesia	- UU No. 23 Th 2006 tentang Administrasi Kependudukan; - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf h, l, dan j	Atas ijin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum	Bertentangan dengan privasi seseorang	Menjaga privasi seseorang
	700 PENGAWASAN				
82	Hasil Audit Terkait Dengan Medical Error	- Kepmenkes No. 496/Menkes/SK/IV/2005 - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf l dan j	Sampai audit diterima oleh yang berhak dan atas ijin penerima hasil audit	Mengganggu ketentraman masyarakat yang terkait drngan bidang kesehatan	Menjaga ketentraman masyarakat

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
83	Hasil Monitoring adanya dugaan penyimpangan PNPM dan program bantuan kepada pemerintah desa/Kelurahan dan kelompok masyarakat	- UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 6 ayat (2) - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j	Sampai selesainya monitoring dan upaya tindak lanjut dalam penanganan terhadap penyimpangan yang terjadi	Mengganggu rencana tindak lanjut pemerintah terutama dalam menangani masalahnya	Penanganan masalah lebih terfokus dan baik
84	Dokumen Hasil pengawasan melekat (Waskat)	- Kepmenpan No. KEP/46/M.DAN/4/2004 tentang Petugas Pengelolaan Pengawasan Melekat dan Pengawasan Pemerintahan - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf h, I, dan j	Atas ijin dari pihak yang menjadi subyek pengawasan	Mengganggu kebijakan lebih lanjut yang akan dilakukan	Kebijakan lebih lanjut akan lebih mudah dilaksanakan
85	Rencana pengawasan Usaha/ Kegiatan oleh PPLHD	- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, I, dan j	Atas ijin dari pihak yang usahanya diawasi	Mengganggu asas pelaksanaan pengawasan: Hanya ditujukan untuk yang dilakukan pengawasan	Sesuai dengan asas pengawasan dalam rangka perbaikan
86	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan j	Atas ijin pihak yang diperiksa	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan
87	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), termasuk LHP pemeriksaan kasus, LHP review laporan keuangan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan j	Atas ijin pihak yang melakukan pemeriksaan kasus atau atas perintah dari penegakan hukum	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan
	800 KEPEGAWAIAN				

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
88	Soal – soal ujian	- UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3) - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf l dan j	Sampai selesainya pelaksanaan ujian tersebut	Mengganggu akuntabilitas pelaksanaan ujian	Menjaga akuntabilitas dan menghindari kebocoran
89	Penelian uji kompetensi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai selesainya uji kompetensi	Mengganggu akuntabilitas pelaksanaan ujian	Menjaga akuntabilitas dan menghindari kebocoran
90	Hasil evaluasi tenaga pengajar dan peserta diklat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai selesainya evaluasi yang dilaksanakan	Mengganggu evaluasi dan tujuan pelaksanaan evaluasi	Menjaga akuntabilitas evaluasi
91	Data hasil check Up perorangan PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Atas ijin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum	Mengganggu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang
92	Data hasil tes potensi/kompetensi PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada ijin yang bersangkutan	Mengganggu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang
93	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf h	Sampai ada pengajuan dari yang bersangkutan	Mengganggu rahasia pribadi seseorang dan berpotensi untuk disalahgunakan	Menjaga rahasia pribadi seseorang
94	Data Rencana penempatan PNS/CPNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf l	Sampai selesainya proses penempatan dari yang bersangkutan	Mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan	Menjaga kebijakan pemerintah supaya lebih tertib
95	Notulen hasil sidang Baperjakat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i	Sampai hasil baperjakat ditindaklanjuti	Mengganggu kebijakan pemerintah	Menjaga kebijakan pemerintah

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
96	Dokumen pertimbangan/rekomendasi Baperjakat	- PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, Pasal 14 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan j	Sampai hasil baperjakat ditindaklanjuti	Mengganggu kebijakan pemerintah	Menjaga kebijakan pemerintah
97	Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	- PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, Pasal 14 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan j	Selama masih berlaku dan dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Mengganggu penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
98	Arsip SK pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	- PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, BAB III; Keputusan Kepala BKN No. 13 Th 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, sebagaimana diubah dengan PP No. 13 Th 2002, Lampiran I Angka Romawi II huruf B No. 4 dan 5, dan huruf C dan D - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan j	Sesuai dengan ketentuan untuk tetap ditatausahakan sampai 30 tahun	Pertimbangan-pertimbangannya dapat mengungkap rahasia jabatan yang bersangkutan	Mengamankan kesinambungan dan kebijakan pemerintah
99	Soal Tes CPNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I	Sampai selesainya test / seleksi	Dapat mengganggu proses rekrutmen PNS dan merusak kerahasiaan seleksi	Menjaga akuntabilitas seleksi
100	Dokumen pengangkatan, pemindahan Guru PNS dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Th 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j	Sampai yang bersangkutan diangkat dalam jabatan	Berpotensi menimbulkan intervensi terhadap kebijakan pimpinan	Kebijakan pimpinan dijauhkan dari intervensi oleh semua pihak

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
101	SK pengangkatan, pemindahan Guru PNS dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Th 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j	Sampai yang bersangkutan diangkat dalam jabatan	Berpotensi menimbulkan intervensi terhadap kebijakan pimpinan	Kebijakan pimpinan dijauhkan dari intervensi oleh semua pihak
102	Daftar nilai DP3 PNS dan SKP	- PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS, Pasal 5/6 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, I, dan j	Atas ijin yang bersangkutan	Mengganggu privasi yang bersangkutan	Menjaga privasi yang bersangkutan
103	Keputusan penjatuhan Hukum disiplin PNS	- PP Nomor 53 Tahun 2010; - Perka BKN No. 21 Th 2010, Romawi IX Angka 8 UU Noh, I, dan jg KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf I	Sampai turunnya penjatuhan hukum disiplin	Dapat berpotensi mengganggu obyektivitas putusan yang akan dijatuhkan	Menjaga obyektivitas putusan
104	Keputusan ijin/keterangan tentang perceraian PNS	- PP No. 10 Th 1983 jo. PP No. 45 Th 1990 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, I, dan j	Sampai keluarnya keputusan ijin	Berpotensi munculnya informasi yang tidak benar dan bisa menimbulkan fitnah	Menjaga obyektivitas putusan ijin

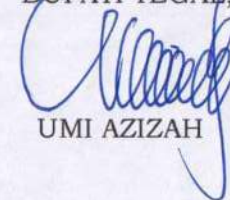


NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
105	Dokumen pengelolaan kepegawaian : a. Kenaikan pangkat b. Kenaikan gaji berkala c. Mutasi d. Pensiun e. Administrasi kepegawaian	- PP No. 9 Th 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS; UU No. 9 Th 1974 jo. UU No. 43 Th 1989 tentang Pokok-pokok Kepegawaian - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, I, dan j	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersangkutan; mengganggu penyusunan kebijakan / menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
106	Biodata elektronik PNS lengkap	- UU No. 11 Th 2008 tentang ITE - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, I, dan j	Selama yang bersangkutan menjadi PNS	Data yang bersifat pribadi bila dibuka akan mengganggu privacy yang bersangkutan	Untuk menjaga kerahasiaan PNS yang bersangkutan
107	Data kepegawaian perorangan PNS lengkap	- UU No. 9 Th 1974 jo. UU No. 43 Th 1989 tentang Pokok-pokok Kepegawaian - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, I, dan j	Selama yang bersangkutan berstatus sebagai PNS	Mengganggu privasi seseorang	Mengamankan hak privasi seseorang
108	Arsip data perorangan PNS	- UU No. 9 Th 1974 jo. UU No. 43 Th 1989 tentang Pokok-pokok Kepegawaian - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, I, dan j	Selama yang bersangkutan berstatus sebagai PNS	Mengganggu privasi seseorang	Mengamankan hak privasi seseorang

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
112	Instrumen Tes potensi/kompetensi PNS/Pejabat	Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses tes potensi / kompetensi PNS / pejabat	Dapat menghambat proses penilaian	Mengamankan proses yang sedang berlangsung
113	Identifikasi potensi PNS	- Keputusan Kepala BKN No. 37 Th 2011 tentang Pedoman Penataan PNS - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf h, I, dan j	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengganggu rahasia pribadi PNS yang bersangkutan dan mengganggu proses kebijakan yang akan diambil	Mengamankan proses pengambilan kebijakan dan melindungi rahasisa PNS yang bersangkutan
900 KEUANGAN					
114	Dokumen proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah laporan/surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) berikut lampirannya.	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan jh	Sampai dengan telah diaudit oleh aparaturn pemeriksa/pengawasan/auditor (BPKP/BPK)	Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan
115	Database Objek Pajak dan Retribusi	- UU No. 11 Th 2008 tentang ITE Pasal 40 - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j	Atas ijin yang bersangkutan	Melanggar privasi wajib pajak / retribusi	Menjaga privasi wajib pajak / retribusi

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
116	Proses pengelolaan administrasi keuangan beserta pembukuannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri No 13 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah</li> <li>- PP No 58 tahun 2005 tentang Keuangan Daerah</li> <li>- PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah</li> <li>- UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara</li> <li>- Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf I dan J</li> </ul>	Setelah selesainya audit	Tidak sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan	Sesuai dengan asas pengelolaan administrasi keuangan

BUPATI TEGAL,



UMI AZIZAH